

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Handoko, Priyo, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai pengaman Kredit Bank*, Center For society Studies, Jember
- Hartanto, J. Andi, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Khoidin, M, 2009, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Laksbang, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Saleh, K Wajik , 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam perkawinan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soekanto , Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soemardjono, Maria SW, 1996, *Hak Tanggungan dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soetopo, Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya

Syaifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, PT. Melton Putra, Jakarta,

## **B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1996-42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II

Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kompilasi Hukum Islam

### **C. PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 63/Pdt.G/2013.Gs

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Putusan Nomor 197/PDT/2015/PT SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017

### **D. TESIS**

Emil Rahadian, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Atas Harta bersama yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan tinggi Jakarta Nomor : 355/PDT/1997/PT.DKI)”, *Yogyakarta*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada

Hanni Irawan, 2017, “Akibat Hukum Transaksi Saham Perseroan Terbatas Atas Nama Pribadi Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Pasangan”, *Yogyakarta*, Ilmu Hukum Jakarta, Universitas Gadjah Mada.

### **E. WAWANCARA**

Hitaprana, 2019, Notaris dan PPAT, *Wawancara*, Sleman, 6 Agustus

Sugeng Riyono, 2019, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, *wawancara*, Yogyakarta, 8 Agustus

Susanto, 2019, Dosen Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *wawancara*, Yogyakarta, 15 Oktober.